

**1 PRIORITAS PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN
LAMPUNG BARAT**

**Ryansyah Izhar¹, Isye Susana. S.T., M.Si.(Han)², Dr. Sri
Maryati. S.T., MIP³**

Institut Teknologi Sumatera
Jalan Terusan Ryacudu, Desa Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, Lampung

Jurnal Pengembangan Kota (xxxx)

Volume x No. x (x-xx)

Tersedia online di:

<http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpk>

DOI: <http://dx.doi.org/10.14710/jpk.x.x.xxx-xxx>

Abstrak

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital dalam mempercepat proses pengembangan wilayah. Kabupaten Lampung Barat ditetapkan sebagai daerah tertinggal dikarenakan ketersediaan infrastrukturnya yang sangat kurang. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk mencari tahu urutan prioritas pembangunan dari kelima infrastruktur di Kabupaten Lampung Barat, yaitu: Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Drainase, Infrastruktur Transportasi (Terminal), Infrastruktur Persampahan, dan Infrastruktur Air Limbah dengan cara menghitung *supply demand* infrastruktur serta mencari faktor yang paling berpengaruh dalam pembangunan suatu infrastruktur dan mencari urutan prioritas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lampung Barat dengan menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP). Berdasarkan hasil analisis *supply demand* didapat bahwa kondisi infrastruktur di Kabupaten Lampung Barat masih belum mencukupi standar pelayanan minimal yang ada sedangkan hasil dari metode AHP adalah dalam membangun infrastruktur faktor pendanaan merupakan faktor yang paling mempengaruhi dalam proses penyediaan infrastruktur di Kabupaten Lampung Barat dengan nilai 0,361, sedangkan untuk infrastruktur yang penyediaannya harus di prioritaskan adalah infrastruktur jalan dengan nilai 0,42. Berdasarkan hasil tersebut, prioritas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lampung Barat adalah penyediaan infrastruktur jalan dengan cara meningkatkan kapasitas jalan serta beberapa indikator jalan lainnya seperti aspek mobilitas dan keselamatan.

Kata Kunci: Infrastruktur Prioritas; Lampung Barat ; AHP

ABSTRACT

Infrastructure development is one of the important and vital aspect in order to accelerating the process of regional development. Kabupaten Lampung Barat was designated by government as disadvantaged areas because of the lack on providing the infrastructure. Therefore, this study is trying to find out the order of priority development of the five infrastructure in Kabupaten Lampung Barat, the infrastructure is: Roads, Drainage, Waste, Waste Water, and transportation by calculating the supply demand infrastructure and find out the order of infrastructure that should be provide first in Kabupaten Lampung Barat using Analytic hierarchy Process (AHP) . The supply demand anlysis showed that the infrastructure on Kabupaten Lampung Barat is still inadequate with the minimum standard and AHP method revealed that the funding factor with the weight values 0,361, is the most important paramter that affect the infrastructure develompent in the study area. While, for the infrastructure, the AHP method revealed that roads infrastructure withe weight values 0,42, is the infrastructure which should be prioritized. Based on these result, the priority development of infrastructure in Kabupaten Lampung Barat is the provision of road infrastructure by increasing the capacity of the road and other road several indicators such as mobility and safety aspects

Keywords: Infrastructure, state and local budgeting, AHP, supply demand analysis

1 PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital dalam mempercepat proses pengembangan wilayah. Infrastruktur juga memberikan dampak dalam peningkatan ekonomi, aksesibilitas, pemberdayaan masyarakat serta kualitas dalam kehidupan manusia. Peningkatan aspek tersebut tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infratraktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur ini menjadi alat dalam peningkatan aspek tersebut (Direktorat Riset dan Pengmas UI, 2007). Pengaruh infrastruktur dalam peningkatan keempat aspek tersebut bisa dilihat dari berbagai indikator. Studi dari Demurger (2000) dalam (Surachman, 2016) disebutkan bahwa infrastruktur adalah faktor utama sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh dalam 30 tahun terakhir pembangunan ekonomi Indonesia tertinggal akibat lemahnya pembangunan infrastruktur (Direktorat

Riset dan Pengmas UI, 2007).

Dari sisi Infrastruktur Kabupaten Lampung Barat masih dikatakan kurang, infrastruktur jalan, air minum, listrik dan telekomunikasi merupakan infrastruktur yang masih kurang penyediaannya ((BI), 2012). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 Kabupaten Lampung Barat termasuk dalam dua daerah yang tertinggal di Provinsi Lampung selain Kabupaten Pesisir Barat. Penetapan daerah tertinggal ini ditetapkan berdasar kriteria perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, infrastruktur, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah.

Dalam praktiknya pembangunan infrastruktur tidak dapat dilakukan serentak, dalam Marsuki, (2007) dikatakan bahwa pada dasarnya infrastruktur merupakan tanggungjawab dan kewajiban pemerintah pusat atau daerah, namun keterbatasan APBN dan APBD menjadi masalah dalam pelaksanaan pembangunannya. Berdasarkan data yang dirilis Bappenas dalam Surachman, (2014), investasi Indonesia dari PDB (Produk Domestik Bruto) terhadap pembangunan infrastruktur hanya mencapai 4,51% dari target minimal 5%, hal ini masih jauh dari India yang mencapai 7%, dan China yang mencapai 11%. Dari data kebutuhan investasi tersebut, masih terdapat

ISSN 2337-7062 © 2015

This is an open access article under the CC-BY-NC-ND license (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>). – lihat halaman depan © 2015

*Korespondensi penulis: alamat email dan no telepon

Diterima day month year, disetujui day month year

selisih kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia yang berjumlah Rp. 324 Triliun atau 17% dari total kebutuhan sebesar Rp. 1.924 Triliun yang tidak bisa disediakan oleh APBN/APBD.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas disebutkan ada 9 (Sembilan) Infrastruktur yang harus diprioritaskan pembangunannya, yaitu: Transportasi, Jalan, Pengairan, Air Minum, Air Limbah, Persampahan, Telekomunikasi dan Informatika, Listrik, dan Minyak dan Gas Bumi. Kesembilan infrastruktur tersebut harus diprioritaskan pembangunannya dikarenakan berdampak langsung dalam kelangsungan hidup manusia.

Secara lebih spesifik, penelitian ini akan melihat prioritas dari infrastruktur tersebut khususnya infrastruktur yang disediakan melalui dana kabupaten atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat, yaitu infrastruktur transportasi, jalan, drainase, air limbah, dan persampahan. Penelitian ini akan menjelaskan secara detail mengapa ada infrastruktur yang harus diprioritaskan pembangunannya dengan mempertimbangkan hubungan infrastruktur tersebut dengan dana terbatas yang dimiliki pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

2 METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu metode pengumpulan data dan metode analisis.

2.1 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara membagikan kuesioner AHP terhadap para ahli seperti akademisi, Bappeda, Dinas PU, dan Dinas Perhubungan. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan kajian literatur seperti data jumlah infrastruktur eksisting, data sosial ekonomi, serta data mengenai kebijakan dan perencanaan lingkup kabupaten terkait dengan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lampung Barat (RTRW dan RPJMD).

2.2 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan dua metode analisis yaitu metode analisis *supply demand* untuk melihat kondisi eksisting infrastruktur yang akan diteliti dan berapa kekurangan infrastruktur tersebut. Serta metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk menentukan urutan prioritas penyediaan infrastruktur di Kabupaten Lampung Barat dengan cara membandingkan faktor yang mempengaruhi penyediaan infrastruktur dengan alternatif infrastruktur yang ada.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Supply-Demand

Analisis *supply* dan *demand* infrastruktur diperlukan untuk mengetahui apakah ketersediaan infrastruktur pada saat ini sudah memenuhi standar yang dibutuhkan atau belum, sehingga dapat diketahui jumlah kebutuhan yang harus dipenuhi agar pengembangan infrastruktur dapat berjalan dengan baik. Dalam penelitian ini standar yang digunakan adalah UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kepmenhub No. 31 Tahun 1995, Kepmenhub No 132 Tahun 2015, SNI 03-1733-2004, Kepmen Permukiman No 534 Tahun 2001 dan Permen PU No. 14 Tahun 2010.

Berdasarkan perhitungan standar tersebut didapat kondisi eksisting infrastruktur di Kabupaten Lampung Barat yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Kondisi Eksisting Infrastruktur Berdasarkan Perhitungan Standar

No	Nama Infrastruktur	Hasil Analisis
1	Jalan	- Telah memenuhi indikator rasio panjang jalan yaitu 2,44 km/ 1000 penduduk. - Masih belum memenuhi indikator rasio luas jalan yaitu hanya 3% dari luas jalan. - Masih belum memenuhi indikator mobilitas dan keselamatan dikarenakan kondisi jalan yang rusak lebih dari 50%.
2	Persampahan	Berdasarkan perhitungan, infrastruktur persampahan di Kabupaten Lampung Barat masih belum memenuhi standar alat penunjang seperti penyediaan wadah komunal, komposter, gerobak sampah, dan truck.
3	Pengairan	Masih banyaknya drainase yang merupakan drainase alam dan tidak baiknya pengelolaan drainase pada kawasan hutan menyebabkan adanya genangan di lokasi tertentu.
4	Air Limbah	- Pembangunan IPAL pada tiap-tiap fasilitas sangat dianjurkan agar limbah non-domestik tidak mencemari limbah domestik yang berasal dari kegiatan perumahan. - Pengolahan limbah menggunakan sistem individu pada perumahan masih dimungkinkan karena kepadatan penduduk yang hanya 1,41 jiwa/ha.
5	Transportasi	Kedua terminal di Kabupaten Lampung Barat masih sangat kurang dalam penyediaan fasilitas pendukung. Fasilitas pendukung seperti tempat bongkar muat, penampungan barang, peribadatan perlu disediakan guna meningkatkan kenyamanan terminal.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa infrastruktur di Kabupaten Lampung Barat yang ada saat ini masih tergolong kurang dalam penyediaannya, hal ini dilihat masih banyaknya infrastruktur di Lampung Barat yang belum memenuhi SPM yang ada.

3.2 Analisis AHP

Analisis ini dilakukan dengan cara pembobotan faktor-faktor guna mengukur tingkat kepentingan antar faktor dan sub faktor. Untuk tujuan tersebut, dilakukan penilaian perbandingan berpasangan antar faktor-faktor tersebut dalam setiap kelompok faktor yang terletak dalam hirarki yang sama. Penilaian dilakukan oleh para responden ahli yang memiliki pengetahuan dan kompetensi dalam proses penyediaan infrastruktur di suatu wilayah.

Penggabungan pendapat para responden ini dilakukan dengan cara rata-rata geometrik. Dari hasil rata-rata tersebut akan diketahui nilai eigenvektor dari masing-masing perbandingan berpasangan dan bobot dari masing-masing faktor dengan menggunakan metode AHP dan menggunakan *software Expert Choice*.

Dalam analisis ini dilakukan tiga tahapan, yaitu pembobotan faktor-faktor, sub faktor dan sub faktor serta perhitungan nilai prioritas dari masing masing infrastruktur.

3.2.1 Pembobotan Faktor-Faktor

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan *software expert choice* didapat hasil bahwa faktor pendanaan memiliki nilai tertinggi dengan nilai 0,361, sedangkan faktor kewenangan dan tanggung jawab berada di urutan kedua dalam tingkat kepentingan dengan nilai 0,215. Faktor kelembagaan dan peraturan perundangan memiliki nilai kepentingan yang sama dengan faktor kewenangan dan tanggung jawab dan faktor risiko memiliki nilai paling kecil dengan nilai 0,208. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam penyediaan infrastruktur di suatu wilayah faktor pendanaan

merupakan faktor yang paling penting untuk di perhitungkan.

3.2.2 Pembobotan Sub-faktor

Pembobotan pada level ini merupakan tahapan kedua setelah pembobotan faktor pada level 1, tahapan ini merupakan tahapan yang penting karena kita bisa melihat parameter yang dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan faktor-faktor prioritas yang menentynkan pemilihan penyediaan infrastruktur di Kabupaten Lampung Barat.

Hasil dari pembobotan, sub faktor dalam faktor pendanaan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 1,00 dikarenakan dalam faktor pendanaan hanya ada satu sub faktor yaitu APBD maka dapat dikatakan bahwa sub faktor APBD merupakan faktor yang sangat penting dalam hal mendanai pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan di Kabupaten Lampung Barat.

Sama halnya dengan faktor pendanaan, sub faktor pemerintah kabupaten dalam faktor kewenangan dan tanggung jawab juga mendapatkan nilai 1,00 dikarenakan hanya memiliki satu sub faktor.

Tabel 3.2 Pembobotan Sub Faktor dalam Faktor Kelembagaan

No.	Sub Faktor Kelembagaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bobot	Peringkat
1	RPJMD	0,525	1
2	RTRW Kabupaten	0,475	2

Tabel diatas menunjukkan hasil perhitungan dari pembobotan Sub Faktor dalam Faktor Kelembagaan. Dapat dilihat bahwa sub faktor RPJMD lebih diprioritaskan dibandingkan RTRW Kabupaten, hal ini mengingat rencana dalam RPJMD lebih pada rencana jangka menengah yang pelaksanaannya dapat dilakukan sesegera mungkin dibandingkan rencana di dalam RTRW yang merupakan rencana jangka panjang.

Tabel 3.3 Pembobotan Sub Faktor dalam Faktor Risiko

No.	Risiko	Bobot	Peringkat
1	Pendanaan	0,614	1
2	Pembangunan	0,386	2

Hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa risiko terhadap pendanaan lebih penting dibandingkan risiko pembangunan. Hal ini didasarkan pendanaan yang sangat terbatas sehingga dalam penyediaan infrastruktur disuatu wilayah risiko pendanaan ini sangat penting untuk dipikirkan. Setelah tingkat kepentingan pada setiap sub faktor diketahui, selanjutnya dilakukan perhitungan tingkat kepentingan secara menyeluruh setiap sub faktor terhadap tujuan dari penelitian ini. Skala prioritas setiap sub faktor secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.4 Pembobotan Sub Faktor yang Mempengaruhi Penyediaan Infrastruktur

No	Sub Faktor	Bobot Lokal	Bobot Global	Peringkat
1	APBD	1,000	0,250	1
2	Kabupaten	1,000	0,250	2
3	RPJMD	0,525	0,131	4
4	RTRW Kabupaten	0,475	0,119	5
5	Risiko Pendanaan	0,614	0,154	3
6	Risiko Pembangunan	0,386	0,097	6

Tabel diatas menunjukkan posisi masing-masing sub faktor yang ada dengan melihat bobot globalnya. Terlihat bahwa sub-faktor APBD memiliki bobot global yang paling tinggi yaitu 0,250, hal ini menunjukkan bahwa dalam menyediakan infrastruktur di Kabupaten Lampung Barat infrastruktur yang berada dalam rencana APBD adalah infrastruktur yang penyediaanya lebih di prioritaskan. Tingginya sub faktor APBD ini bukan berarti harus mengabaikan sub faktor yang lain, dalam penyediaan infrastruktur setiap sub faktor harus diperhatikan agar infrastruktur yang disediakan efektif.

3.2.3 Prioritas Infrastruktur di Kabupaten Lampung Barat

Tabel 3.5 Urutan Prioritas Penyediaan Infrastruktur di Kabupaten Lampung Barat

Faktor/Alternatif	Pendanaan (0,361)	Kewenangan (0,215)	Kelembagaan (0,215)	Risiko (0,208)	Nilai Prioritas
Jalan	0,146566	0,095675	0,084925	0,08736	0,41
Transportasi	0,078698	0,04988	0,05547	0,048672	0,23
Persampahan	0,058482	0,02881	0,027735	0,030784	0,15
Drainase	0,042598	0,02365	0,02881	0,025584	0,12
Air Limbah	0,034656	0,01677	0,01806	0,015808	0,09

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa infrastruktur jalan atau alternatif I memiliki nilai prioritas tertinggi dengan nilai prioritas 0,41. Hal ini berarti dalam membangun infrastruktur di Lampung Barat infrastruktur jalan harus lebih diprioritaskan pembangunannya. Sedangkan infrastruktur lain yang nilai prioritasnya dibawah infrastruktur jalan tetap harus diprioritaskan tetapi untuk menjadi pendukung dari pembangunan infrastruktur Jalan.

4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pendekatan studi dan analisis dengan menggunakan metode *supply demand* dan metode AHP maka diperoleh beberapa temuan studi antara lain:

1. Infrastruktur di Kabupaten Lampung Barat yang ada saat ini masih tergolong kurang dalam penyediaannya, hal ini dilihat masih banyaknya infrastruktur di Lampung Barat yang belum memenuhi SPM yang ada.
2. Melalui penilaian tingkat kepentingan faktor terhadap tujuan, maka diperoleh hasil bahwa pembobotan faktor pendanaan menempati urutan pertama dengan nilai (36,1%), faktor kewenangan menempati urutan kedua dengan nilai (21,5%), selanjutnya faktor kelembagaan dengan nilai (21,5%) dan urutan terakhir adalah faktor risiko dengan nilai (20,8%). Hal ini membuktikan bahwa faktor pendanaan paling berpengaruh terhadap pemilihan penyediaan infrastruktur di Kabupaten Lampung Barat.

3. Urutan sub faktor yang menentukan pemilihan penyediaan infrastruktur yang pertama adalah sub faktor dana APBD dengan nilai (25%), yang kedua adalah sub faktor kewenangan pemerintah kabupaten dengan nilai (25%), sub faktor risiko pendanaan berada di urutan ketiga dengan nilai (15,4%), sub faktor RTRW kabupaten di urutan kelima dengan nilai (11,9%), dan sub faktor risiko pembangunan berada di urutan terakhir dalam pemilihan penyediaan infrastruktur dengan nilai (9,7%).

4. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, urutan infrastruktur yang harus di prioritaskan pembangunannya di Kabupaten Lampung Barat adalah Infrastruktur jalan, hal ini karena penilaian infrastruktur jalan memiliki nilai paling tinggi dibandingkan dengan alternatif lainnya dan sesuai untuk lebih diprioritaskan pembangunannya di Kabupaten Lampung Barat yang memang memiliki kondisi jalan kurang baik.

5 Daftar Pustaka

- Aschauer, D. A. (1990). *Why Is Infrastructure Important?* New York.
- Parkin, J., & Sharma, D. (1999). *Infrastructure Planning*. London: Thomas Telford.
- Saaty, T. L. (1980). *The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource*

Allocation. New York: McGraw-Hill International Book Co. USA.

Saleh, D. Z., & et, a. (2014). *Mozaik Permasalahan Infrastruktur Indonesia*. Jakarta: Ruas.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Yogyakarta: Alfabeta, CV.

Wahidi, R. (2015). *Membangun Perdesaan Modern (Tata Kelola Infrastruktur Desa)*. Jakarta: PT Indec.

BPS Kabupaten Lampung Barat,

2015. *Lampung Barat Dalam*

Angka 2015. Liwa. Badan

Perencanaan dan Pembangunan

Daerah Kabupaten Lampung

Barat, 2013.

Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan. Liwa. *Materi Teknis RTRW Kabupaten Lampung Barat 2010 – 2030*. Liwa.

Bank, World. (1994). *World Development Report: Infrastructure for*

Development. New York: Oxford University Press.

Indonesia, Bank. (2012). *Laporan*

Final Penelitian

Pengembangan

Komoditas/Produk/Jenis

Usaha Unggulan Umkm

2012 *Provinsi Lampung*.

Bogor: Pt. Primakelola

Agribisnis Agroindustri.

- Dailami, M., & dkk. (2011). *Global Development Horizon 2011 - Multipolarity: The New Global Economy*. World Bank.
- Das, S. B., & James, C. (2013). Addressing Infrastructure Financing in Asia. *ISEAS Working Paper*.
- Direktorat Riset dan Pengmas UI. (2007). *KAJIAN ASPEK KEMASYARAKATAN DI DALAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR INDONESIA*. Depok: Universitas Indonesia.
- Hanafie, R. (2010). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Indonesia, P. R. (2015). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Irawati, & Dkk. (2012). Pengukuran Tingkat Daya Saing Daerah Berdasarkan Variabel Perekonomian Daerah, Variabel Infrastruktur dan Sumberdaya Alam, Serta Variabel Sumber daya Manusia di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. *J@TI Undip*, 43-50.
- Malik. (2011). Analisis Ketersediaan Infrastruktur Jalan Sebagai Upaya Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Perkotaan. *Jurnal Sabua Vlo*:3, 1-6.
- Marsuki. (2007). Strategi Membangun Infrastruktur Pemerintah Daerah. *Workshop Inn Red International*, (p. 2). Jakarta.
- Murwito, S., & et.al. (2012). *Infrastructure Quality, Local Government Spending and Corruption*. KPPOD.
- Prasetyo, R. B., & Firdaus, M. (2009). Pengaruh Infrastruktur Pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 222-236.
- Pisu, M. (2010). Tackling Infrastructure Challenge in Indonesia. *OECD Economics Departement Working Paper*, No. 809.
- Saaty, T. L. (2008). Decesion Making With The Analytic Hierarchy Process. *Int. J. Services Sciences*, Vol. 1, No. 1, 2008, 83-98.
- Keputusan Menteri Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor

534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimum

Bidang Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pekerjaan Umum.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal

Tahun 2015 – 2019.

SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Penataan Lingkungan Perumahan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Surachman, E. N. (2016, April 24).

Files: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Retrieved from Kementerian Keuangan Republik Indonesia: kemenkeu.go.id

Syaifullah. (2010, Februari). *Syaifullah08 Wordpress*. Diambil kembali dari

Wordpress: syaifulla08.wordpress.com